

Judul : Angka putus sekolah turun, Senayan: jangan cepat berpuas diri
Tanggal : Jumat, 08 Mei 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Angka Putus Sekolah Turun Senayan: Jangan Cepat Berpuas Diri

KALANGAN politisi Senayan mengapresiasi capaian Pemerintah dalam menurunkan angka putus sekolah dalam lima tahun terakhir. Ini membuktikan komitmen serius dalam menjaga akses belajar bagi anak. Tapi, capaian itu boleh membuat Pemerintah berpuas diri.

Data tahun ajaran 2020/2021 hingga 2024/2025 menunjukkan penurunan angka putus sekolah pada semua jenjang pendidikan di Indonesia. Total siswa putus sekolah pada tahun ajaran 2024/2025 tercatat sebanyak 66.866 jiwa. Angka itu mengalami penurunan sekitar 20,1 persen jika dibandingkan data tahun ajaran 2020/2021 yang mencapai 83.724 siswa.

Anggota Komisi X DPR Muhammad Hilman Mufidi mengatakan, capaian ini membuktikan adanya upaya serius Pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia. "Kerja keras ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga keberlanjutan proses belajar di sekolah. Sinergi yang kuat jadi kunci utama dalam menekan angka siswa yang berhenti sekolah," jelasnya, Kamis (7/5/2026).

Meski begitu, Hilman mengingatkan Pemerintah tidak cepat berpuas diri. Pasalnya, angka putus sekolah yang hingga saat ini masih menyentuh puluhan ribu siswa merupakan tantangan besar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) harus terus bekerja keras untuk menuntaskan masalah krusial ini.

Menurutnya, setiap anak Indonesia berhak memperoleh layanan pendidikan layak serta berkelanjutan di sepanjang kehidupan mereka. Berbagai faktor penyebab anak putus sekolah mulai dari persoalan ekonomi hingga akses sosial harus ditangani komprehensif. Upaya ini dilakukan agar tidak ada lagi hambatan bagi anak dalam menempuh pendidikan.

Jumlah siswa putus sekolah, sambungannya, harus dicegah secara maksimal agar anak-anak Indonesia mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik. Langkah antisipasi itu akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan. "Pendidikan berkualitas jadi fondasi utama untuk membangun kemajuan bangsa yang berkelanjutan," ucapnya.

Sejalan dengan itu, Wakil Ketua Komisi X DPR My Esti Wijayanti menegaskan, negara wajib hadir memberi jaminan konkret bagi akses pendidikan. Tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang terpinggirkan dari sekolah karena alasan apa pun. Pendidikan merupakan hak dasar yang harus disediakan melalui fasilitas sangat layak.

Keadilan dalam kualitas pendidikan bagi seluruh anak bangsa juga harus jadi prioritas utama dalam setiap kebijakan. Karena tantangan saat ini bukan hanya soal akses, melainkan upaya menghilangkan ketimpangan yang terlalu dalam. Perhatian khusus sangat dibutuhkan terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah 3T. ■ PVB